BANK KOPERASI dan FINANCIAL TECHNOLOGY: LEMBAGA dan INOVASI PEMBERDAYAAN OPERASIONAL KEUANGAN UMKM MEMASUKI 2025 PASCA ACFTA (ASEAN *China Free Trade Area*)

Budianto Tedjasuksmana[1], P. Julius F. Nagel[2]

Jurusan Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya[1], Jurusan Manajemen Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya [2]

e-mail: juliusnagel@ymail.com

ABSTRACT

Financial Technology (Fintech), into the development of information systems and good corporate challenges in general trade, services and manufacturing in Indonesia. Utilization of Fintech is proven to be able to open greater access to formal financial services, encourage economic growth, and inclusive and sustainable development. Presidential Regulation No. 82 of 2016 concerning the National Strategy for Inclusive Finance, aims to create economic independence by moving the strategic sectors of the domestic economy, including the development of SMEs in Indonesia should be encouraged from various parties, especially the role of government should very active in establishing the Cooperative Bank. ASEAN involvement involved in trading with China, ACFTA, there are still mentioned various obstacles for Indonesian SMEs, one of which is capital. In each of these SMEs from countries that have joined ASEAN need an agency of the State Fund Holders who oversees all of SMEs. With the consideration that the flow of funds coming from developed countries and other investors requiring intermediary National Authority, the role of representative institutions of Indonesian SMEs are banks, or more properly called a cooperative bank. The existence of the Cooperative Bank also considers the main tasks of the sociological aspects of SMEs related to the economic welfare of society.

Keywords: *Cooperative Bank, Fintech, SMEs*

ABSTRAK

Financial Technology (Fintech), menjadi perkembangan sistem informasi dan tantangan perusahaan pada umumnya baik dagang, jasa maupun manufaktur di Indonesia. Pemanfaatan Fintech terbukti mampu membuka akses yang lebih besar terhadap layanan jasa keuangan formal, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan inklusif dan berkelanjutan (www.depkes.go.id). Perpres no. 82 tahun 2016 tentang Strategi Keuangan Nasional Inklusif, bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik termasuk perkembangan UMKM di Indonesia perlu didorong dari berbagai pihak, khususnya peranan pemerintah yang seharusnya sangat aktif dalam mendirikan Bank Koperasi. Adanya keterlibatan ASEAN yang berdagang dengan China, ACFTA, masih saja disebutkan adanya berbagai kendala bagi UMKM Indonesia, yang mana salah satunya adalah masalah permodalan. Dalam tiap UMKM dari negara yang bergabung dalam ASEAN perlu sebuah badan Pemegang Dana dari Negara tersebut yang membawahi semua UMKM yang ada. Dengan pertimbangan bahwa aliran dana yang masuk dari Negara maju dan para investor lainnya membutuhkan perantara National Authority, maka peranan lembaga yang representatif dari Indonesia adalah bank UMKM, atau lebih patut disebut sebagai bank Koperasi. Keberadaan Bank Koperasi juga mempertimbangkan tugas pokok dari aspek sosiologis UMKM terkait dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kata kunci: Bank Koperasi, *Fintech*, UKM.

PENDAHULUAN

Potensi Ekonomi Indonesia

Hadirnya *financial technology* (*fintech*), di Indonesia adalah suatu terobosan inovasi keuangan model bisnis yang baru, seperti model aplikasi, yang memengaruhi pasar keuangan serta institusi bahkan layanan jasa yang ada. Ernama (2017) menyebutkan ada 142 perusahaan yang bergerak di bidang fintech yang beroperasi di Indonesia. Diardo (2018) pada obyek penelitiannya di UMKM Jogja, menyebutkan bahwa faktor penggunaan fintech menyangkut aspek eksternal yaitu tawaran dari

penyedia layanan, informasi dari sesama pelaku, dan aspek internal misalnya informasi pasar, layanan fintech. Tingkat penggunaan akses internet dapat dilihat seperti pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Daftar Negara Pengguna Internet 2013 – dan 2017/2018 (juta)

No.	Negara	Tahun		
		2013	2017	2018
1.	China	620,7	736,2	777,0
2.	U.S.A	246,0	269,7	274,1
3.	India	167,2	313,8	346,3
4.	Jepang	100,0	105,0	105,4
5.	Indonesia	72,8	112,6	123,0

Sumber: Julianto, 2016

Winarni (2006), dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa tiga hal teratas kesulitan utama dan terbesar UMKM di Indonesia adalah masalah permodalan menempati 51,09 %, kesulitan pemasaran 34,72 % dan disusul oleh kesulitan bahan baku sebesar 8,59 %. Wignaraja dan Injarak (2014) menyebutkan bahwa kontribusi UMKM Indonesia dalam hal tenaga kerja pada kisaran 97 %, dan kontribusi UMKM terhadap PDB 57 %, serta kontribusi pada nilai ekspor dari UMKM Indonesia adalah pada kisaran sebesar 12 %, Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN, efek dari perekonomian Yunani yang terganggu dengan Uni Eropa, penguatan maupun pelemahan nilai dollar, diungkapkan sebagai faktor penyebab tidak majunya UMKM di Indonesia. Hal tersebut memang tidak salah, karena diluar UMKM Indonesiapun juga mengalami tekanan dan gangguan ekonomi dunia. Perlu bagi semua pemerhati UMKM yang ada untuk lebih melaksanakan secara nyata baik perencanaan yang sudah dicanangkan, dukungan riil dalam hal pemasaran, keuangan, insentif, kerjasama regional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode riset sekunder (*secondary research*), menggunakan data riset yang telah dikumpulkan oleh orang lain dan dilaporkan dalam buku, artikel dalam jurnal profesional atau sumber lain dari internet.

PEMBAHASAN

1. Bank Koperasi Sebagai Wadah Layanan Industri Perbankan Dalam Pengembangan Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

McKinsey (2015), dalam penelitiannya melaporkan bahwa sejak 2011, perusahaan-perusahaan telah melakukan adopsi layanan digital-banking, yang berimbas pada peningkatan yang pesat di seluruh Asia. Banyak kelemahan yang sudah diketahui oleh umum bahwa UMKM perlu didukung dalam masalah permodalan, namun tentunya Bank swasta nasional maupun bank pemerintah sendiri melakukan langkah kehati-hatian dalam mengucurkan dana kepada UMKM. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada umumnya harus memiliki suatu kelembagaan yang besar agar supaya jangkauan yang ada juga besar (Ismawan, 2002). Pemerintah Kenya yang telah mengadakan kerjasama dengan Bank Dunia dalam membentuk UMKM yang ada dalam negara tersebut, telah menunjukkan hasil yang sangat baik. (Hua, 2013). Penyaluran kredit yang dilakukan oleh fintech P2P telah dicatat oleh OJK, dan disebutkan mencapai Rp 7,64 trilliun. Fahmi Firdaus *et al.* (2018), mencatat dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa dalam tahun 2017 dari 56,4 juta UMKM, sebanyak 76,1% memperoleh pembiayaan dari bank dan 23,9% mengakses dari non-bank, termasuk koperasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UMKM sangat membutuhkan pendanaan dalam operasionalnya, seperti yang ditegaskan oleh Tedjasuksmana (2014), bahwa pemberdayaan UMKM hanya akan

terjadi secara nyata apabila terdapat dukungan masalah permodalan. Dengan keterbatasan asset UMKM yang dapat digunakan sebagai jaminan kredit kepada bank, tidak mengherankan bahwa Nuryahya (2018) dalam penelitiannya menekankan peranan BMT (Baitul Maal dan Baitul Tamwil), yang menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana sebagai bagian dari aspek sosial, sehingga dapat dipakai demi kemajuan kinerja pemohon kredit khususnya UMKM. *International Finance Corporation* (2016), yang memaparkan hasil survei tentang permasalahan utama dari tiga kelompok UMKM, yaitu UMKM informal, UMKM semi formal dan UMKM formal. Kurangnya masalah pembiayaan dikeluhkan pada UMKM informal berkisar 20 %, sedangkan UMKM formal 10 %, Akses ke pasar pada UMKM informal berkisar pada angka 11 %, sedangkan UMKM formal 8,5 %. Beban pajak tinggi dikeluhkan pada hampir semua kelompok UMKM informal, semi formal dan formal. Perlu dicatat juga adanya transaksi pembayaran informal pada semua kelompok UMKM. Kredit yang diajukan untuk tujuan pembelian sediaan lebih banyak berkisar kurang dari Rp 300 juta sebanyak 51 %, sedangkan pada kelompok UMKM yang mengajukan kredit pada kelompok Rp 2,5 milyar hanya sebesar 29 %. Sektor pemasaran diperhatikan oleh kelompok perusahaan yang mengajukan kredit sebesar Rp 2,5 milyar sebesar 11 %. Hal yang perlu dicatat bahwa UMKM yang bersifat informal lebih banyak mengajukan permohonan kredit, yaitu pada besaran angka 48 % dan disetujui sebesar 80 nya, dan jumlah kredit yang disetujui maksimal Rp 100 juta. International Finance Corporation (2016), dalam hasil observasinya juga menyatakan bahwa aspek suku bunga menempati prosentase sekitar 22 – 24 %, dan aspek prosedur pengajuan kredit menduduki kisaran 23 %. Nugroho dan Tamala (2018), menyatakan dalam hasil pengamatan penelitiannya yang dilakukan pada 72 UMKM Binaan Pasar Malam Akbar Kemayoran, yang memahami bagi hasil dalam bank syariah sejumlah 16 UMKM, dan UMKM yang telah menjadi nasabah bank syariah tersebut berjumlah 6 dengan masa keanggotaan selama 1-2 tahun dan 5 UMKM dengan masa kurang dari 1 tahun. UMKM yang tidak memanfaatkan pinjaman melalui bank syariah sejumlah 17, sedangkan 1 UMKM yang memanfaatkannya. UKMC (2018) menyebutkan bahwa Usaha Mikro kecil dan Menengah memainkan peranan penting dalam ekonomi Indonesia, karena menyumbang kontribusi sekitar 56 – 59 % terhadap PDB. UU yang mengatur tentang UMKM, dan BPS mempunyai definisi yang berbeda, demikian pula dengan Lembaga Keuangan Bank Jadi perlu adanya keseragaman dari sebuah lembaga yang menaungi dan sekaligus memayungi semua UMKM yang ada. Bank Koperasi atau bank UMKM sebagai jawaban atas hal ini perlu merumuskan definisi baru tentang UMKM.

Kenan Institute Asia memaparkan bahwa perlu sebuah badan yang menjembatani dari *National Authority* suatu Negara dengan pendonor dari Negara maju yang mempunyai minat dalam membantu pengembangan UMKM. Menurut pandangan penulis perlu adanya sebuah lembaga atau badan usaha yang dapat dipandang sebagai badan representatif resmi sebagai wadah akumulasi dari semua UMKM, dan memenuhi persyaratan regulasi misalnya sebuah bank yang dapat mendampingi serta memayungi peranan UMKM. Bank Koperasi adalah sebuah jawaban untuk hal tersebut, sebuah bank yang merupakan representasi dari semua UMKM. Pertimbangan yang lain perlunya definisi tentang UMKM perlu disatukan dalam Bank Koperasi yang ada, sebab dibandingkan definisi UMKM di Vietnam, Uni Eropa, Malaysia dan negara lainnya definisi UMKM Indonesia masih memiliki definisi yang relatif lebih rendah. Bank Koperasi lebih cenderung dapat mewadahi integrasi UMKM seluruh Indonesia, khususnya bagi UMKM yang berkeinginan menembus pasar dunia internasional, untuk mengatasi *internal barriers* sumber pendanaan, dan *external barriers* seperti *governmental barriers*, serta *environmental barriers* misalnya *tariff and non tariff barriers.* Bank Koperasi merupakan perpaduan antara bank yang bertugas memberikan layanan jasa keuangan, serta akumulasi wadah UMKM. Dengan demikian diharapkan Bank Koperasi dapat dikelola oleh orang-orang yang berkompeten dan berkecimpung , bergulat dengan operasional serta cukup mumpuni dalam UMKM. Bank Koperasi dapat mewadahi UMKM dengan melakukan *bench-mark* pada UMKM negara lain, menjawab tentang stimulus ekspor, membantu melakukan analisa *Strengh Weakness Opprotunity and Threat* (SWOT). Dalam UKMC (2018) yang mengolah data yang ada dari Bapenas, dipaparkan

tentang skenario pertumbuhan ekonomi tinggi bagi Indonesia menjadi US $ 28,934. Sektor mikro sekarang ini seyogyanya juga perlu dipertimbangkan untuk mengejar margin yang makro, melihat adanya kesempatan yang dapat diraih, seperti yang dimuat Kontan (No 38, 2019), menyebutkan bahwa kontribusi kredit mikro hingga Maret 2019, mencapai Rp 244,56 trilliun dari total kredit UMKM. Non Performing Loan pada usaha mikro ini adalah 2,06 %, yang mana masih dibawah NPL kredit kecil dan menengah 3,79 dan 4,28. BRI memasang target pertumbuhan kredit mikro 15 %, dengan kisaran Rp 315,44 trilliun. Bank mandiri juga mempunyai rencana dalam menyalurkan kredit mikro Rp 131,58 trilliun hingga akhir 2019. Penyaluran kredit Bank Mandiri dipatok sebesar Rp 2 juta , agar dapat menjangkau segmen pertanian, perkebunan dan perikanan. Pertumbuhan kredit mikro pada tahun 2018 sebesar 236,86 dan sampai pada Maret 2019 pada angka 244,56. Porsi kredit untuk UMKM per maret 2019 dapat dipetakan terdiri dari sektor kecil sebesar 31,09 %, sektor mikro 24,98 %, serta sektor menengah 43,91 %.

Tentunya bank sebagai usaha bisnis mematok suku bunga dasar. Kredit usaha mikro BRI sebesar 17,50 %, bank Mandiri 17,75 %, bank Danamon 17 %, Maybank Indonesia 18,30 %, bank Panin 18 % serta BPTN 17,29 %. Suatu hal yang sudah sering diketahui keluhan-keluhan UMKM tentang tingginya tingkat bunga pinjaman. Hal –hal yang diuraikan di atas bisa menjadi motivasi bagi pendirian Bank UMKM atau Bank Koperasi, sehingga UMKM Indonesia dapat menjadi salah satu pilar ekonomi.

2. Fintech Sebagai Layanan Digitalisasi Ekonomi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Jangkauan layanan *fintech* pada umumnya dapat dikelompokkan sebagai berikut : (1) *Fintech* dan Kesehatan; (2) *Fintech*, Pendidikan, dan Infrastruktur Dasar; serta (3) *Fintech*, Tenaga Kerja, dan Kewirausahaan. Deloitte (2015), memaparkan bahwa kegiatan UKM di Indonesia dapat dikategorikan dalam 3 kelompok yaitu kelompok UKM *off line* sejumlah 36%, kelompok UKM *on line basic* sebesar 37%, serta UKM *on line* menengah sejumlah 18%, dan kelompok UKM *on line* lanjutan sebesar 9%. Dari hasil survei diketahui bahwa UMKM sebesar 96% lebih memiliki akses ke komputer, 84% nya memiliki *smartphone* dan 73% memiliki akses ke koneksi internet. Distribusi bisnis berdasarkan tingkat keterlibatan secara digital dapat dikelompokkan yaitu UMKM bisnis *offline* 36%, UMKM bisnis *online* dasar 37%, dan UMKM bisnis *online* menengah 18% serta UMKM bisnis *online* lanjutan hanya 9%. Keterlibatan UMKM dengan pasar ASEAN perlu dikembangkan karena bisnis *offline* mencapai 0,9% ,sedangkan UMKM bisnis *online* dasar berhubungan dengan pasar ASEAN hanya 5,9% tetapi hubungan dengan pasar internasional hanya 2,5%. Prosentase populasi yang mengambil keputusan pembelian dengan akses internet di Vietnam sebesar 81%, sedangkan Indonesia 62%, di bawah Thailand 69%. Literasi digital pada bidang keuangan dari suatu perusahaan bisnis, menurut Potter James W. (2005), meliputi pita lebar (*broad band)*, bisnis elektronik (*e-commerce)*, media sosial, tehnologi awan (*cloud)*,serta *platform* seluler (*mobile platform).* yang memungkinkan bagi UMKM jika mengadopsi *fintech* diharapkan akan menghantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah pada 2025. Kelemahan UKM Indonesia dalam daya saing , tercermin dari akses pada pembiayaan (skor 7,2), tenaga kerja terdidik yang memadai (skor 6.3) dan infrastruktur yang tidak memadai dengan skor 9.5 (*World Economic Forum*, 2011) Deloitte (2015), menyebutkan bahwa 50,2 % UMKM menyatakan bahwa akses ke pelanggan baru di Indonesia sangat terbantu dengan teknologi digital, sedangkan akses ke market baru di luar negeri sebesar 33,7%. Pemerintah perlu mendukung pemain lokal yang ada, memperkuat keamanan *online*, dan melakukan koordinasi secara komprehensif dengan berbagai pihak yang terkait, mendorong pembayaran transaksi non *cash* (*e-payment*), serta adanya *portal web* UMKM. Adanya penggunaan *fintech* secara meluas pada semua UMKM di Indonesia tentu akan berpengaruh pada Indeks Pangsa Pasar, karena merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan terhadap pesaingnya sekaligus sebagai rambu-rambu sejauh mana kesulitan yang dihadapi. Triharini *et al*.

(2012), dalam penelitiannya mengungkapkan adanya pendekatan *One Village One Product* (OVOP), dalam mengembangkan kerajinan gerabah, bahwa pengembangan dilakukan di satu desa dalam memproduksi satu produk berkelas unggul , yang merupakan keunikan daerah setempat tersebut. UMKM Indonesia perlu mencoba membangun *bench mark.*

Transaksi uang elektronik mencapai RP 47,2 trilliun pada 2018 (Kontan 43. 2019). Maraknya pembayaran non tunai ini seyogyanya pemain lokal diberikan layanan jaringan kerja sama yang diprakarsai oleh Bank UMKM atau Bank Koperasi. Suatu regulasi perlu dibuat agar tidak terdapat *predatory pricing*. Penawaran layanan jaringan jasa titip yang telah terdaftar di Bea Cukai juga perlu disimak bagi UMKM.

3. Evaluasi Diri UMKM

Peneliti mencoba melakukan observasi tentang hal-hal yang dirasakan sebagai hambatan oleh UMKM, dengan melakukan diskusi pada tenan-tenan UMKM yang beroperasi pada *event-event* tertentu yang terdapat di *mall-mall* wilayah Surabaya dengan pengamatan selama 3 tahun , dengan hasil olahan data sebagai berikut:

Tabel 2. Permodalan UMKM 2015-2018

NO.	MODAL SENDIRI	JML	TAMBAHAN MODAL	JML
1	Lebih kecil dari Rp 5 juta	68	Rp 1 - Rp 5 juta	51
2	Rp 6 – Rp 10 juta	35	Rp 6 – Rp 10 juta	39
3	Rp 10 - Rp 20 juta	22	Rp 10 - 20 juta	30
4	Rp 20 juta keatas	15	Rp 20 juta keatas	20

Tabel 3. Kelompok Usaha Tenan UMKM

Jenis Usaha UMKM	Jumlah	Persentase
Kerajinan bambu , batik	60	42,8
Kerajinan kulit	25	17,8
Pengolah Makanan	40	28,5
Lainnya	15	10,7
T O T A L	140	100

Tabel 4. Keluhan Pengusaha Atas Pengajuan Kredit

I T E M Komponen	Persentase
Plafond Maksimum Kredit	(120/140) 85,71
Tingkat Bunga Pinjaman	(115/140) 82,14
Proses Pengajuan Kredit	(95/140) 67,85
Jangka Waktu Pelunasan	(110/140) 78,57
Alasan lainnya	(40/140) 28,57
T O T A L	140

Deskripsi data di atas membuktikan kesulitan-kesulitan UMKM di lapangan.

KESIMPULAN

Pembentukan Bank Koperasi, diharapkan sebagai wadah dalam mewakili UMKM seluruh Indonesia serta menjadi lembaga representative di dunia internasional bertugas mengembangkan layanan program kredit UMKM. Berdasar *World Bank Index* kinerja UMKM Indonesia tercatat di

peringkat 144 dari 189 di tahun 2015. Pembentukan Bank Koperasi seyogyanya lebih konkrit dalam menyusun metodologi pemberian kredit kepada UMKM, bahwa panduan yang ada diikuti oleh para mitra Bank Koperasi perlu mengikuti perkembangan jaman agar sekurang-kurangnya setara dengan badan-badan usaha yang sudah mapan, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai Koperasi. Reorientasi pada Koperasi dengan mengadopsi basis teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

[1] De Loitte, Access Economics, Strancombe Research and Planning , UKM Pemicu Kemajuan Indonesia, Instrumen Pertumbuhan Nusantara 2015
[2] Hua, X. (2-13) http :// Non traditional private equity financing can be a win-win solution for SME.
[3] Ismawan, Bambang, Ekonomi Rakyat : Sebuah Pengantar, Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, Jakarta, 2002 Financial Club
[4] Julianto, P.A. 2016. Cara Perbankan Penuhi Kebutuhan Nasabah. Kompas. 2016.
[5] Kenan Institute Asia, The ASEAN SME Regional Development Fund Conceptual Framework.
[6] Kontan no. 38 , 2019
[7] Kontan no. 43 , 2019
[8] Diardo, L. 2018. Analisis Transaksi Pembayaran Menggunakan Fintech Pada UMKM di Indonesia: Pendekatan Adaptive Structuration Theory. *Thesis* S2. Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia.
[9] Nugroho, Lucky , Tamala Dewi, Persepsi Pengusaha Terhadap Perbankan Syariah, SIKAP, vol. 3, No 1, 2018
[10] Nuryahya Erwanda , *SME's Fintech :* Menunjang Peningkatan BMT Melalui Pembiayaan dan Perekrutan Anggota berbasis Tehnologi, Jurnal Ilmu Ekonomidan Keuangan Islam vol 1 no 1 2018, PPEB UPI .
[11] Triharini, Meirina, Dwinita Larasati dan Susanto (2012), Pendekatan One Village One Product (OVOP) Untuk Mengembangkan Potensi Kerajinan Daerah : Studi Kasus Kerajinan Gerabah di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, ITB Jvis Art and Des vol 6 no. 1
[12] Tedjasuksmana, Budianto, Potret UMKM Indonesia dalam menghadapi masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, the 7 th NCFB and Doctoral Cooloquium 2014, Towars A New Indonesia Business Architecrure Sub Tema Business And Economic Transformation Towards AEC 2015, Fakultas Bisnis dan Pascasarjana UKWMS
[13] UKMC. UKM Center Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Agustus 2018
[14] Wignaraja, G & Injarak, Y. 2014. Is Finance a Binding Constraint for SME Participation in Trade in Asia, (online), (http://www.asiapathways-adbi.org/2014/06/is-finance-a-binding-constraint-for-sme-psrticipation-in-trade-in-asia, diakses 5 Agustus 2019).
[15] Winarmi, S. (2006). Strategi Pengembangan Usaha Kecil Melalui Peningkatan Aksessibilitas Kredit Perbankan , Infokop, No 29 Th XXII.
[16] World Economic Forum (WEF), 2011 dalam http ://www.bapenas.go.id/blog.wp-content/uploads
[17] www.depkes.go.id (diakses 5 Agustus 2019).